

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan keuangan dibuat dan disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pemerintah Belanja Daerah (APBD) seperti yang diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006.

Pada awal tahun, BPK (Badan Pengawasan Keuangan) akan melakukan audit terhadap LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah). Dalam proses pengauditan, BPK perlu memperhatikan beberapa kriteria yaitu, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Audit dilakukan oleh BPK setiap tahunnya dan dari pemeriksaan tersebut akan menghasilkan opini yang di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis opini diberikan oleh BPK, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*). LKPD yang disusun dan disajikan secara wajar akan diberikan predikat WTP, yang dimana setiap daerah berupaya untuk mendapatkan predikat tersebut dari BPK.

Menurut pandangan LKPD di Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tahun 2014 diketahui bahwa Kabupaten Gunung Kidul memiliki opini dengan klasifikasi

Wajar Dengan Pengecualian (WDP), tetapi pada tahun 2015 Kabupaten Gunung Kidul telah berhasil mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Setiap kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil mempertahankan opini WTP mereka dari tahun 2014 hingga 2022. Hal ini menunjukkan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan opini LKPD di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tetapi, walaupun sudah mendapat predikat WTP masih juga ditemukan beberapa masalah seperti kurangnya kompetensi dan pengetahuan SDM dalam manajemen keuangan yang diterapkan. Salah satu permasalahan yang terjadi adalah rendahnya penyerapan APBD di OPD Kabupaten Gunung Kidul yaitu hanya sebesar 45,63% dari total APBD yang disediakan hingga pertengahan tahun, ini menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang efisien. Selain itu dalam pelaksanaannya, beberapa OPD Kabupaten Gunung Kidul tidak mematuhi tata kelola yang baik, seperti pada keuangan tahun anggaran 2021, terdapat temuan berupa ketidakteraturan dalam pengelolaan pajak reklame dan piutang daerah. Dari hal tersebut menunjukkan kurang baiknya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Gunung Kidul. Sebuah laporan yang berkualitas akan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan, seperti keandalan, relevansi, dapat dibandingkan, dan dipahami, seperti yang disebutkan dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Namun, dalam kenyataannya, laporan keuangan pemerintah daerah sering kali tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang umum digunakan. Jika dilihat dari masalah diatas, masih terdapat kendala dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang efisien ini tidak sesuai dengan dimensi dari kualitas

laporan keuangan, yaitu relevan, karena ketidaktepatan penyerapan anggaran mengakibatkan laporan keuangan yang disusun dan disajikan tidak menggambarkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Kemudian terkait masalah ketidakteraturan dalam pengelolaan pajak reklame dan piutang daerah sehingga menyebabkan terjadi adanya celah administratif yang bisa membuka peluang terjadinya manipulasi anggaran, hal ini tidak sesuai dengan dimensi andal, karena informasi yang disajikan belum sesuai dengan transaksi serta peristiwa yang seharusnya disajikan.

Kabupaten Gunung Kidul menghadapi masalah yang mengungkapkan kekurangan dalam kemampuan sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal yang berdampak negatif pada pemerintah daerah. Selain itu, penggunaan yang tidak optimal dari Teknologi Informasi dalam mencatat dan melaporkan keuangan juga akan berdampak negatif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang diharapkan dapat dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Berdasarkan uraian diatas, Kualitas Laporan Keuangan di kabupaten Gunung Kidul dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan harus merupakan tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam akuntansi pemerintahan untuk menghasilkan laporan keuangan yang andal dan berkualitas. Seperti yang tertuang pada Undang-Undang 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa:

“Sumber Daya Manusia yang disebut juga tenaga kerja adalah setiap individu yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang mampu memenuhi kebutuhan baik individu maupun bersama. Setiap pegawai perlu memiliki kompetensi kerja yang baik. Kompetensi ditempat kerja mengacu pada kemampuan setiap orang untuk melakukan pekerjaan mereka dengan cara yang memenuhi standar yang ditetapkan mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja”

Untuk menyusun dan menyajikan kualitas laporan keuangan yang baik, sumber daya manusia perlu mengetahui dan menerapkan prinsip-prinsip penyusunan laporan keuangan dengan sesuai. Hal ini berkaitan dengan kompetensi sumber daya manusia di Kabupaten Gunung Kidul karena masih terdapat masalah pada bendahara desa dalam mengelola dan melaporkan keuangan masih kurang sehingga laporan keuangan daerah yang dibuat kurang berkualitas dan andal. Oleh karena itu, kompetensi sumber daya manusia perlu untuk ditingkatkan guna memperbaiki kualitas laporan keuangan di daerah tersebut.

Tidak hanya sumber daya manusia, tetapi pemanfaatan teknologi informasi juga memiliki dampak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Setiap tahunnya, teknologi selalu semakin berkembang sehingga pemanfaatan teknologi informasi telah menjadi hal biasa. Menurut Susilo (2016), teknologi informasi adalah semua metode dan alat terintegrasi untuk menangkap, memproses, mengirim, dan menyajikan data secara elektronik dalam berbagai format yang berguna untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi dan efektif.

Jika dikaitkan dengan masalah diatas bahwa kurangnya kompetensi dan pengetahuan SDM dalam manajemen keuangan yang diterapkan di Kabupaten Gunung Kidul hal ini tentunya menjadi tantangan bagi pemerintah daerah di era digitalisasi ini. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan mengenai teknologi tentu akan menghambat proses pembuatan laporan keuangan dan mengurangi kualitas dari sebuah laporan keuangan. Maka dari itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi guna meningkatkan skill dalam mengelola keuangan daerah, serta menyediakan

informasi keuangan daerah kepada masyarakat secara transparan. Hal ini menjadi kendala dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam proses akuntansi yang belum optimal.

Selain itu, sistem pengendalian internal juga mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Pengendalian internal merupakan salah satu cara untuk mengarahkan, mengukur sumberdaya dalam suatu organisasi, dan memainkan peran penting dalam pencegahan dan pendeteksian penyelewengan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipercaya (Omposungu & Salomo, 2019). Untuk meyakinkan publik dan pemangku kepentingan tentang keakuratan dan keandalan laporan keuangan yang disusun oleh pemerintahan, diperlukan sistem pengendalian internal yang optimal untuk menjaga aset organisasi. Dengan kata lain, jika sistem pengendalian internalnya tidak dilakukan dan dijalankan dengan benar dan optimal akan berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini berkaitan dengan permasalahan di atas yaitu, beberapa OPD melakukan penggelembungan anggaran belanja kegiatan dan perjalanan dinas sehingga terjadi pemborosan dan ketidaksesuaian antara pelaksanaan dan laporan penggunaan anggaran. Yang artinya, sistem pengendalian internal pada beberapa OPD di Kabupaten Gunung belum tertata dengan baik dan benar. Akibatnya, kualitas laporan keuangan yang dihasilkan kurang berkualitas.

Jika dilihat dari fenomena yang telah diuraikan dalam latar belakang, maksud dari penelitian ini adalah agar dapat menjadi bahan refleksi dan evaluasi bagi Pemerintah Daerah di Kabupaten Gunung Kidul guna mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Gunung Kidul.

Sehingga penelitian ini mengangkat judul : **“PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG KIDUL”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain :

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul?
3. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul?

1.3. Batasan Penelitian

Agar penelitian ini lebih spesifik dan terfokus serta untuk membatasi permasalahan yang akan diteliti, peneliti membuat batasan variabel yang akan diteliti antara lain :

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010, disebutkan bahwa kualitas laporan keuangan diukur menggunakan beberapa indikator, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Dengan penggunaan indikator tersebut diharapkan dapat lebih difokuskan mengenai bagaimana mencapai kualitas laporan keuangan yang memenuhi seluruh indikator tersebut, serta mengatasi segala kemungkinan hambatan atau tantangan yang mungkin akan muncul pada saat proses penyusunan dan pelaporan laporan keuangan (Yadiati & Mubarak, 2017).
2. Adapun variabel independen dan indikator yang ditetapkan oleh peneliti, yaitu:
 - a. Kompetensi sumber daya manusia adalah ciri khas individu yang memiliki keahlian khusus, keterampilan, pengetahuan, dan bertanggung jawab. Indikator kompetensi sumber daya manusia pada penelitian ini terdiri dari: pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku (Yadiati & Mubarak, 2017).
 - b. Pemanfaatan teknologi informasi adalah penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah penyelesaian tugas atau pekerjaan. Indikator pemanfaatan teknologi informasi terdiri dari: jumlah komputer yang tersedia dan aktif dan pemanfaatan yang optimal dari jaringan internet yang sudah terpasang (Yadiati & Mubarak, 2017).

- c. Sistem pengendalian intern adalah metode yang digunakan untuk memantau kinerja sumber daya manusia dalam suatu organisasi, dan memiliki peran yang krusial dalam mencegah dan mendeteksi adanya kecurangan (penipuan). Indikator sistem pengendalian intern mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 terdiri dari: penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompeten, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, dan penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia (Yadiati & Mubarak, 2017).
3. Penelitian ini akan difokuskan pada pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul. Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Gunung Kidul dengan menggunakan data populasi dan sampel yang relevan.
4. Metode pengumpulan data yang akan digunakan meliputi wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, serta analisis data akan dilakukan melalui uji pendahuluan dan uji hipotesis sesuai dengan tujuan penelitian.

1.4. Tujuan Penelitian

Melihat latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul.
2. Untuk mengetahui apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul.
3. Untuk mengetahui apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul.

1.5. Manfaat Penelitian

Studi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mereka yang membutuhkannya dalam teori dan praktik antara lain :

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para peneliti di masa depan dalam pengembangan dan perluasan pengetahuan tentang akuntansi pemerintahan di Indonesia.
2. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan masukan dan panduan yang berharga bagi pemerintah desa dalam menentukan kebijakan untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah di masa mendatang.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penelitian ini, peneliti membagi menjadi lima bab, dimana antara bab satu dengan bab lainnya saling berkaitan, sehingga penulisan penelitian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Adapun sistematikanya adalah:

Bab I : PENDAHULUAN

Bab I menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : LANDASAN TEORI

Bab II menjelaskan mengenai teori yang melandasi masing-masing variabel penelitian. Pada bab II juga akan dipaparkan mengenai kerangka konseptual dan hubungan antara variabel serta hipotesis penelitian.

Bab III : METODE PENELITIAN

Bab III menjelaskan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri populasi dan sample, variabel penelitian, jenis dan teknik pengumpulan data, metode pengukuran data, metode pengujian instrumen serta metode analisis data.

Bab IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab IV menjelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan beserta pembahasannya.

Bab V : PENUTUP

Bab V menjelaskan kesimpulan hasil penelitian, implikasi manajerial, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

